

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. (Bandung: Alumni, 1983).
- Budiono, Herlin. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Cetakan ke-2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. terjemagan Somardi. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Martono, H.K. dan Agus Pramono. *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Peranginangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Cetakan ke-7. (Bandung: Sumur Bandung, 1981).
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Pradnia Paramita, 1997).
- R. Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- S, H. Salim H. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Simanjutak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Subekti, Raden. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-10. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Suparman, H. Erman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cetakan ke-5. (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Binaaksara, 1984).

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. (Jakarta: Erlangga, 1999).

Tutik, Titik Triwulan dan Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan ke-41. (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)*.

_____. *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

_____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

_____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.*

C. Jurnal

Budiono, Herlien. *“Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar).* (Jakarta: Jurnal Renvoi Mediatama, 2005).

Febriana, Dhea Tri dan Ahars Sulaiman. *“Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT”.* *Studi Kantor Notaris & PPAT Anita Mahdalena, SH.* Vol. 1 No. 1 Juni 1979.

N, Herlina Ratna S. *“Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”.* *Keadilan Progresif.* Vol. 6 No. 2 September 2015.

Prawira, I Gusti Bagus Yoga. *“Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, Kajian Hukum dan Keadilan IUS”.* Vol. IV No.1 April 2016.

D. Kamus

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary.* Tenth Edition. (Amerika Serikat: Thomson Reuters, 2014).